

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN ENDE**Kartika Saridewi Mochdar¹, Apriana Marselina², Nuraini Ismail³**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**

^{1,2,3}Universitas FloresEmail: kartikamochdar@gmail.com**ABSTRACT**

This study aims to determine how the implementation of the internal control system in collecting transportation terminal levies in Ende district as a source of local original income (PAD) has been running. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. The location of the research was carried out at the office of the Transportation Office located on Jalan Ahmad Yani No.14 Ende Regency. The type of data used in this study is qualitative data obtained from the object under study using documentation, observation, interview and literature study techniques. The qualitative data obtained are data on internal control in collecting regional levies in the form of explanations and descriptions obtained from the objects studied and written documents at the Ende Regency Transportation Office. In this study using primary data and secondary data. The design used to analyze this study is a descriptive method. The Internal Control System implemented by the Ende Regency Transportation Office in collecting terminal levies has not been in accordance with the government's internal control system Number 25 of 2018 because it does not use the existing/installed Control Evaluation and Revision of policies and procedures.

Keywords: Internal Control System, Terminal Levy, Local Original Revenue (PAD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal angkutan di kabupaten Ende sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) sudah berjalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan pada kantor Dinas perhubungan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.14 Kabupaten Ende. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yang diperoleh dari objek yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi, obsevasi, wawancara dan studi pustaka. Data kualitatif yang diperoleh yaitu data mengenai pengendalian intern dalam pemungutan retribusi daerah yang berbentuk penjelasan dan uraian yang diperoleh dari objek yang diteliti serta dokumen tertulis di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Rancangan yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah metode deskriptif. Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Ende dalam pemungutan retribusi terminal belum sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 karena tidak menggunakan Evaluasi Pengendalian yang ada / terpasang dan Revisi atas kebijakan dan prosedur

Kata kunci: Sistem Pengendalian Intern, Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PENDAHULUAN

Perekonomian modern pada saat sekarang ini, dunia usaha diwarnai dengan kompetensi yang semakin ketat. Sehingga saatnyalah untuk memantapkan strategi pembangunan yang lebih mengandalkan kekuatan sendiri, dengan kemampuan dan ketangguhan seluruh potensi perekonomian bangsa bagi peningkatan kemandirian dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan (Nirwana, 2015:1).

Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang mantap dan berkesinambungan diperlukan adanya ketersediaan dana dan pembiayaan yang besar, baik untuk anggaran rutin maupun untuk pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya melalui

peningkatan dana dari sumber penerimaan berupa anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan daerah (APBD) maupun melalui peningkatan dana masyarakat untuk membiayai pembangunan (Nirwana, 2015:1).

Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai penerimaan daerah akan sangat menentukan pelaksanaan tugas pemerintah pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Dalam mewujudkan peran pemerintah daerah tersebut, satu hal yang harus dimiliki oleh daerah adalah kemampuan dalam pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada sumber pendapatan yang lebih besar (Suciati *et al.*, 2016). Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah Kabupaten Ende adalah pemungutan retribusi terminal. Pemungutan Retribusi Terminal merupakan Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang akan disetor pada kas daerah dan menjadi sumber pendapatan yang sah dan menjadi ukuran kinerja dinas mengingat semakin meningkatnya jumlah kendaraan transportasi seiring pertumbuhan social ekonomi masyarakat yang memberikan dampak pada peningkatan mobilitas, sehingga pemasukan daerah dari sector retribusi terminal akan meningkat pula.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. Pengendalian intern penting dalam pemungutan karena dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja organisasi dengan meneliti apakah system telah sesuai dengan aturan manajemen yang telah ditetapkan dan menjamin bahwa setiap penerimaan yang diperoleh telah dicatat dan diorganisasi dengan baik serta di setorkan seluruhnya ke kas daerah (Suciati *et al.*, 2016).

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi terminal dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Ende dengan acuan / dasar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha (Karcis Retribusi Terminal) dan petugas terminal secara struktur langsung dibawah pengawasan Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir dan Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Setiap Terminal menerima jatah pembagian blok karcis berbeda sesuai tipe terminal dan semua melalui pencatatan oleh Petugas Bendahara Penerima Retribusi. Setiap bulan diadakan rapat evaluasi pencapaian pendapatan asli daerah dari sector terminal.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam mengelola keuangan daerahnya, karena melalui PAD tersebut dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya (Azhar., 2021).

Kabupaten Ende merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan kewenangan sepenuhnya untuk pengelolaan retribusi terminal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ende. Dalam pemungutan retribusi, dinas teknis pemerintah kabupaten ende tidak lepas dari masalah yang merupakan penghambat dalam pemungutan retribusi tersebut. Permasalahan intern yang terjadi pada terminal Tipe C (Terminal Angkutan Pedesaan) yang ada di Kabupaten Ende yaitu terminal maukaro, terminal detusoko dan terminal wolowaru belum maksimal penerimaan karena terbatasnya SDM petugas dan masih banyak kendaraan yang belum patuh untuk membayar retribusi terminal sehingga pendapatan belum meningkat dan pelaksanaan pemungutan pada hari pasar saja. Sehingga pemasukan ttribusi terminal pada Kabupaten Ende belum memenuhi target seperti yang diharapkan.. Masih banyak juga para sopir angkutan umum khusus sopir angkot dan elf yang membayar retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, dengan alasan salah

satunya kurangnya pemasukan harian yang diterima dan tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa terminal yang tidak membayar retribusi sesuai dengan peraturan dan tarif yang ditetapkan (Mohamad Irwan Djafar, 21 September 2022).

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor pengelolaan 6 terminal dalam wilayah Kabupaten Ende sebesar Rp. 97.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 91.200.000 dengan presentasi 93,54%. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 88.700.000 dengan presentasi sebesar 90,97%. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 92.200.000 dengan presentasi sebesar 94,56%. Pada tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 106.274.000 dengan presentasi sebesar 109,00%. Sedangkan pada tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 117.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 110.803.000 dengan presentasi sebesar 94,70%. Dengan demikian dari tahun 2018-2022 penerimaan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kabupaten Ende yang mencapai target hanya pada tahun 2021.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan instansi lain yang terkait dan perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen retribusi daerah yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Untuk itu diperlukan adanya manajemen retribusi daerah secara optimal, efisien, dan efektif, supaya apa yang direncanakan bisa tercapai dalam pelaksanaan (Mohamad Irwan Djafar, 21 September 2022). Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal angkutan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ende.

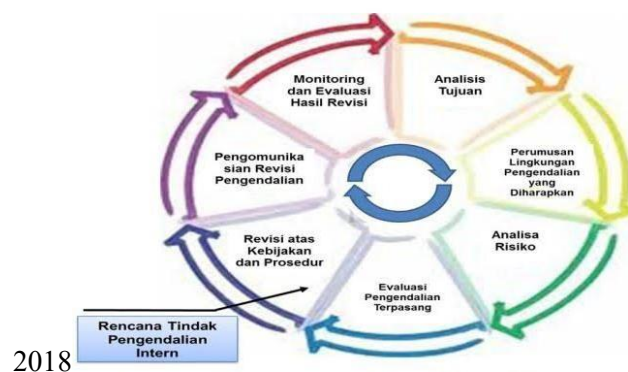
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Munaische *et al.*, 2018) penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berusaha mendiskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Dinas Perhubungan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No.14 kabupaten Ende. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Gambar 4.1 Flowchart SPIP Nomor 25 Tahun

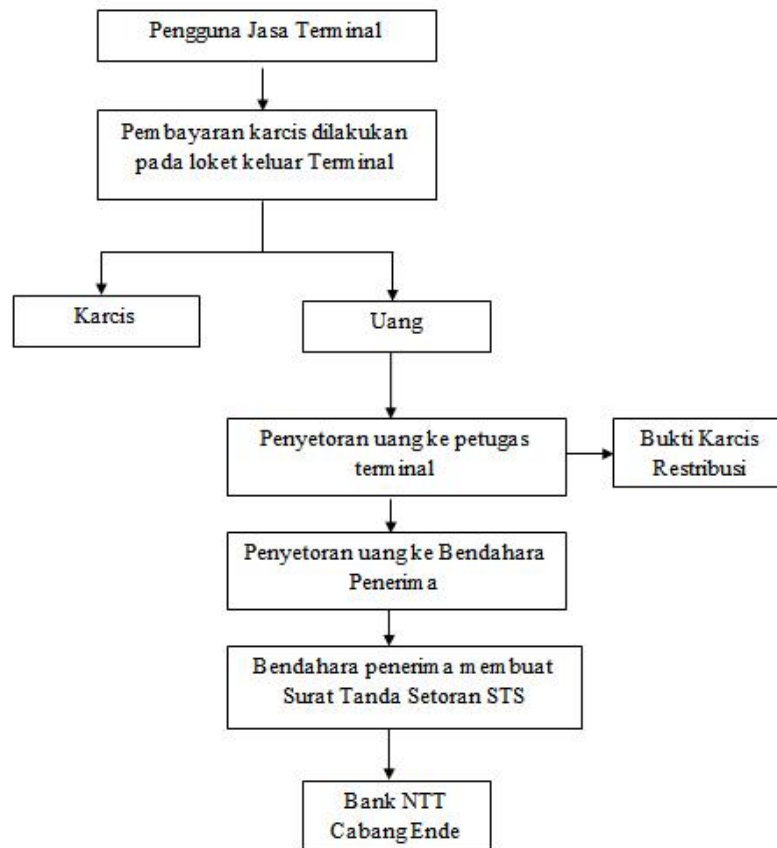


Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat dengan sangat jelas bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas perhubungan Kabupaten Ende belum sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Ende hanya menyajikan lima komponen Sistem Pengendalian Intern pemerintah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penetapan Resiko, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemantauan atau Pengawasan dan Aktivitas Pengendalian tanpa menerapkan Evaluasi Pengendalian Terpasang, Revisi atas Kebijakan dan Prosedur, dan Pengkomunikasian Pengendalian. Evaluasi Pengendalian Terpasang dimana ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan kecocokan atau kecukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya. Revisi atas Kebijakan dan Prosedur untuk mendukung budaya internal yang mengakui pentingnya mutu dalam pelaksanaan penugasan. Sedangkan Pengkomunikasian Pengendalian yaitu menetapkan rencana pengkomunikasian informasi atas perbaikan pengendalian.

Gambar 4. 1 Alur Pemungutan Retribusi



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ende 2023

Dari gambar 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas kepada pengguna jasa melalui pintu keluar terminal dan pembayaran karcis secara manual.
2. Wajib retribusi membayar retribusi terutang kepada petugas pemungut retribusi
3. Petugas terminal menyetor uang pemungutan retribusi kepada kordinator/kepala terminal dengan bukti blok karcis yang sudah terbayar.
4. Kordinator/kepala terminal melakukan penyetoran hasil pemungutan retribusi kepada Bendahara penerima setiap hari kerja dan bendahara melakukan pencatatan dalam pembukuan.
5. Bendahara penerima wajib membuat Surat Tanda Setoran (STS) hari berikutnya untuk melakukan setoran pendapatan terminal ke Bank.
6. Pihak Bank menerima uang hasil pemungutan retribusi dari Bendahara penerima kemudian memberikan validasi ke Surat Tanda Setoran (STS).
7. Setiap bulan bendahara penerima membuat laporan evaluasi pendapatan yang disesuaikan dengan target bulanan.

Pembahasan

Sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi terminal Kabupaten Ende

Sistem pengendalian intern dalam pemungutan retribusi Terminal Kabupaten Ende yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Terminal yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi terkait

Terdapat beberapa fungsi yang terdapat dalam satu kali pemungutan retribusi Terminal Kabupaten Ende. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain sehingga terbentuk satu kesatuan. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi pemungutan

Fungsi pemungutan yaitu petugas pemungut retribusi. Petugas pemungut bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi kepada wajib retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang di persamakan yaitu karcis retribusi yang telah di validasi.

2. Fungsi pencatatan

fungsi pencatatan yaitu Bendahara Penerima Pembantu di bantu oleh petugas penerimaan. Bendahara Penerima Pembantu bertugas untuk menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 1 dari petugas pemungut retribusi, menerima uang hasil pungutan retribusi, menghitung, dan mencatat ke dalam Buku Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.

3. Fungsi penyetoran

Fungsi penyetoran adalah petugas penyetor dibawah koordinasi dari Bendahara Penerima Pembantu. Petugas penyetor bertugas untuk menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke Bank Pemabangunan Daerah (BPD) kemudian menyerahkan Surat Tanda Setoran yang telah di validasi oleh pihak Bank Kepada Bendahara Penerima Pembantu.

4. Fungsi pembukuan

Fungsi pembukuan bertugas untuk membukukan uang hasil pemungutan retribusi ke dalam buku harian dan buku induk dalam satu kali pemungutan serta membuat laporan beru nota dinas dari hasil pemungutan yang di peroleh.

b. Dokumen yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam pemungutan retribusi Terminal Kabupaten Ende yaitu sebagai berikut :

1. Karcis

- Kercis merupakan dokumen utama yang digunakan oleh petugas pemungut retribusi terminal sebagai bukti pemungutan
2. Surat Tanda Setoran
Surat Tanda Setoran dibuat oleh Bandahara Penerima Pembantu untuk menyetorkan hasil pungutan yang di peroleh setiap hari ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD).
- c. Elemen dalam pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Ende
- Elemen dasar dalam pemungutan Retribusi Terminal Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:
1. Wajib Retribusi
Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai dengan tingkat penggunaan jasa yang digunakan di lingkungan terminal. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian terminal, jenis pelayanan, jenis kendaraan, jumlah dan waktu pelayanan.
 2. Petugas pemungut retribusi
Petugas pemungut bertugas untuk melakukan pungutan retribusi kepada wajib retribusi dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen yang dipersamakan yaitu karcis yang telah divalidasi.
 3. Bendahara Penerima Pembantu
Bendahara Penerima Pembantu bertugas untuk menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 1 dari petugas pemungut retribusi, menerima uang hasil pungutan retribusi, menghitung dan mencatat ke dalam Buku penerimaan dan Surat tanda Setoran.
 4. Bagian Akuntansi
Bagian akuntansi bertugas untuk menerima SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) lembar 3 dari petugas pemungut retribusi kemudian membukukan uang hasil pungutan retribusi kedalam buku harian.
 5. Petugas Penyetor
Petugas Penyetor dibawah koordinasi dari Bandahara Penerima Pembantu bertugas untuk menyetorkan uang hasil pungutan retribusi ke Bank Pembangunan daerah (BPD) kemudian menyerahkan Surat Tanda Setoran yang telah divalidasi oleh pihak Bank ke Bendahara Penerima Pembantu.
 6. Pihak Bank
Pihak bank dalam hal ini yaitu Bank pembangunan Daerah (BPD), pihak Bank menerima uang hasil pungutan retribusi dari petugas penyetor kemudian memberikan validasi ke Surat Tanda Setoran (STS).
- d. Unsur Pengendalian Intern
- Unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem pemungutan retribusi di setiap Terminal Kabupaten Endeterdiri dari organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat dan karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur-unsur pengendalian intern dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal selanjutnya dirincikan sebagai berikut :
1. Organisasi
Struktur organisasi dalam Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal telah ada pemisahan tanggung jawab fungsional yang tegas. Hal ini dapat dilihat dari adanya satu orang atau satu unit dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi di

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dikepalai oleh seorang Kepala UPTD, kemudian dibagi menjadi beberapa unit yaitu Urusan Tata Usaha, Urusan Pungutan, Urusan Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, Urusan Keamanan dan Ketertiban, dan Urusan Kebersihan dan Perawatan Bangunan. Diluar itu juga terdapat staf yang menangani bagian umum dan kepegawaian, pembantu bendahara barang, pembantu bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pendapatan.

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Dalam sistem pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Ende telah ada sistem wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Penggunaan formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi pemungutan retribusi, yang dipakai sebagai dasar untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi.

3. Praktik yang sehat

Cara-cara yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal dalam menciptakan praktik yang sehat untuk melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pamakaiannya dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang
- b. Adanya pemeriksaan mendadak (surprised audit) yang dilaksanakan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dengan jadwal yang tidak teratur.
- c. Pemungutan retribusi terminal tidak dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang melainkan dilaksanakan oleh beberapa orang petugas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
- d. Adanya peraturan jabatan yang diadakan rutin, sehingga dapat menjaga independensi pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Adanya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah apabila menemukan kejanggalan. Pengawasan ini dilakukan secara rutin dengan cara sebagai berikut :
 1. Pengawasan dilakukan secara langsung atau inspeksi mendadak (SIDAK)
 2. Pengawasan dilakukan dengan cara melihat dari hasil dan laporan realisasi penerimaan retribusi terminal.
- f. Secara periodic diadakan pencocokan atau rekonsiliasi antara kekayaan secara fisik dengan catatan akuntansinya untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan catatan akuntansi.

4. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya

Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian yang lain dapat dikurangi sampai batas minimum, maka perusahaan akan mampu menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan. Untuk dapat mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, cara yang ditempuh oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Peran Kepala UPT Terminal melakukan pemantauan intern kepada 6 kepala terminal dibawah kendali dinas perhubungan yaitu :

1. Memastikan pendistribusian blok karcis restribusi terminal dengan melakukan pencatatan alokasi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sehingga mudah untuk pengontrolan dari nomor seri karcis sehingga tidak bisa di manipulative oleh petugas.
2. Melakukan pengendalian terhadap standart operasi prosedur (SOP) terminal angkutan.
3. Menjalankan fungsi pencatatan dan keuangan
4. Mengantisipasi adanya resiko terhadap restribusi terminal yang telah dilakukan peninjauan berkala.
5. Menganalisis resiko terhadap pengaduan dan masukan dari pengguna jasa
6. Melaksanakan pertanggungjawaban secara lisan atau tulisan

Tabel 4.1 Target dan realisasi penerimaan retribusi dari setiap terminal di Kabupaten Ende

No	Nama terminal	Target	Realisasi	Belum terealisasi	Persentase %
1.	Terminal detusoko	Rp 3.000.000	Rp 1.700.000	Rp 1.300.000	56,67%
2.	Terminal kota	Rp 30.000.000	Rp 18.414.000	Rp 11.586.000	61,38%
3.	Terminal maukaro	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 500.000	83,33%
4.	Terminal ndao	Rp 30,000,000	Rp 29.148.000	Rp 852.000	97,16%
5.	Terminal rewarangga	Rp 48.000.000	Rp 7.250.000	Rp 20.750.000	56,77%
6.	Terminal wolowaru	Rp 3.000.000	Rp 900.000	Rp 2.100.000	30,00%

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kabupaten Ende 2023

Seperti yang digambarkan pada tabel 4.1 Dinas Perhubungan Kabupaten Ende menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sector pengelolaan 6 Terminal dalam wilayah Kabupaten Ende pada Terminal Detusoko sebesar Rp. 3.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.700.000 belum terealisasi sebesar Rp.1.300.000 dengan persentase 56,67%. Pada Terminal Kota target sebesar Rp.30.000.000 terealisasi sebesar Rp.18.414. 000 belum terealisasi sebesar Rp.11.586.000 dengan persentase 61,38%. Pada Terminal Maukaro target sebesar Rp.3.000.000 terealisasi sebesar Rp.2.500.000 belum terealisasi sebesar Rp. 500,000 dengan persentase 83,33 %. Pada Terminal Ndao target sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp.29.148.000 dan belum terealisasi sebesar Rp. 852.000 dengan persentase 97,16%. Pada Terminal Rewarangga target sebesar Rp.48.000.000 terealisasi sebesar Rp.27. 250.000 dan belum terrealisasikan sebesar Rp.20.750.000 dengan persentase 56,77%. Pada terminal wolowaru target sebesar Rp.3.000.000 terealisasi sebesar Rp.900.000 dan belum terealisasi sebesar Rp.2.100.000 dengan persentase 30,00 %.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dinas perhubungan Kabupaten Ende belum sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Dimana Dinas Perhubungan Kabupaten Ende hanya menyajikan lima komponen Sistem Pengendalian Intern pemerintah yaitu Lingkungan Pengendalian, Penetapan Resiko, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pemantauan atau Pengawasan dan Aktivitas Pengendalian tanpa menerapkan

- Evaluasi Pengendalian Terpasang, Revisi atas Kebijakan dan Prosedur, dan Pengkomunikasian Pengendalian.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal sebagian besar berasal dari luar sehingga sulit diatasi karena permasalahan ini bertumpu pada masih kurangnya kesadaran wajib retribusi tertentu dan wajib pungut retribusi untuk melaksanakan pungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku

REFERENSI

- Arens A. Alvin, Randal J. Elder dan Mark S. Beasley. 2015. *Auditing Dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jilid 1. Edisi Lima Belas-Jakarta. Erlangga.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02).
- Ertisa, M. & Elim, I. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(1), 889-897.
- Fauzi, Achmad dan Iskandar. 2014. Cara Membaca APBN. Brawijaya University Press: Malang.
- Fitriani, E., Hidayah, N. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Pemungutan Dan penyetoran Retribusi Pasar Pada Dinas Perdagangan Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 01(01), 40-53.
- Hery. (2014). Pengendalian Akuntansi Dan Manajemen. Jakarta Kencana.
- Iqbal, M., & Sunardika W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10-35.
- Kaunang, M. M., Kalangi, L., & Runtu, T. (2018). Analisis Mekanisme Pemungutan Efektivitas Retribusi Pasar Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 482-490.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maruta, H. (2015). Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)*, 16-28.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta Salemba Empat.
- Munaiseche, Claudio V., Ilat, V., & Lambey, R. (2018). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Dan Penerimaan Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 875-883.
- Nasir, M. Safar.(2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembanguna*, 2(1), 30-45
- Purnama Sari, W., & Miftahuljannah. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010-2017). *E-JOURNAL EQUILIBRIUM MANAJEMEN*, 5(2), 12-19.

Rahman, Herlina. 2015. *Pendapatan Asli Daerah*.

Suciati, S., Handayani, S. R., & Hidayat, R. R. (2016). Evaluasi Pengendalian Intern Atas Pemungutan Retribusi Parkir (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo).

Sutandi, S. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Dinas Perhubungan Dinas Palembang. *Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 46-53.

Windhu Putra. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers.

Yoyo Sudaryo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.